

**PERAN KEPEMIMPINAN *MERAJE* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Study pada Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten
Muara Enim)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

HERA ANITA HERLINA

NPM. 1621020139

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/2021 M

**PERAN KEPEMIMPINAN *MERAJE* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten
Muara Enim)

Skripsi

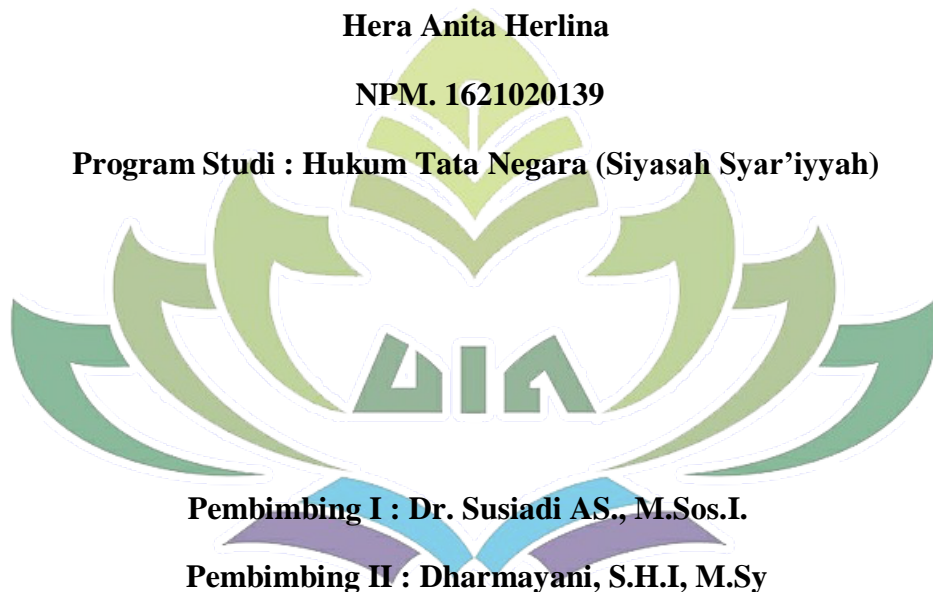
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Hera Anita Herlina

NPM. 1621020139

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I, M.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Kepemimpinan adat semende memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam kepemimpinan adat yang diterapkan dalam keluarga yang di sebut dengan *Meraje* yang diartikan sebagai *Raja* atau *Pemimpin dalam kerajaan*. *Meraje* adalah setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari keluarga sebelah jalur ibu. *Meraje* memiliki hak dan wewenang mengontrol, mengendalikan, dan menghakimi peran yang di mainkan *tunggu tubang* itu sendiri. *Meraje* juga memiliki peran penting sebagai penerus keturunan dan juga penting sebagai penjaga adat supaya tetap lestari.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung dan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang di ambil dari sejumlah responder yang terdiri dari masyarakat desa Pagar Agung. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu kepemimpinan adat semende yang berlaku di desa Pagar Agung masih kental dengan adat dan menjunjung tinggi peran *meraje*, yang mana *meraje* baik itu kakak atau adik dari sebelah ibu sangat dijunjung tinggi. *Tunggu tubang* di masyarakat adat semende tidak sekedar sebagai bentuk identitas yang perlu mereka pertahankan, akan tetapi di balik itu semua terselip kepentingan bagi laki-laki (*meraje*) untuk tetap mempertahankan dan menguatkan kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang diposisikan sebagai *tunggu tubang* tidaklah memiliki kekuasaan sebagaimana yang terlihat. Dengan kata lain pemberian hak kepada perempuan dalam *tunggu tubang* tersebut hanya untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan saja. Pemberian peran kepada perempuan *tunggu tubang* berimplikasi pada kekuasaan yang disandang oleh kaum perempuan, akan tetapi justru terjadi penguat kekuasaan bagi kaum laki-lakinya (*meraje*). Dalam perspektif fiqh siyasah menegakan kepemimpinan merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama terutama bagi kaum laki-laki, sebab manusia butuh saling membantu satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, peran *meraje* sangat penting demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan adat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

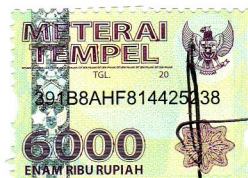
Nama : Hera Anita Herlina
NPM : 1621020139
Jurusan/prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERAN KEPEMIMPINAN MERAJE DALAM SISTEM ADAT SEMENDO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Study Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Desember 2020

Penulis



HERA ANITA HERLINA
NPM. 1621020139



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Hera Anita Herlina

NPM : 1621020139

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : PERAN KEPEMIMPINAN MERAJE DALAM SISTEM ADAT
SEMEDE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Desa Pagar
Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

NIP. 195808171993031002

Pembimbing II,

Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)”** disusun oleh **Hera Anita Herlina**,
NPM : **1621020139**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**.
Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 4 Januari 2021**.

TIM PENGUJI

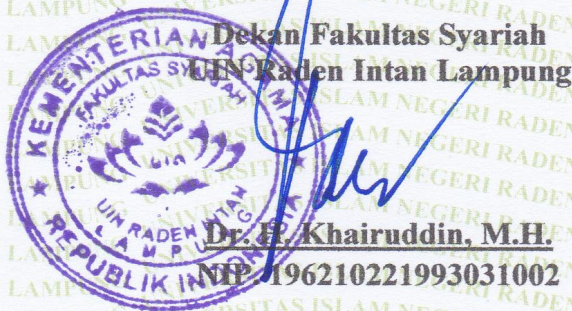
Ketua : Frenki, M.SI.

Sekretaris : Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji II : Dr. Susiadi As., M. Sos.I.

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.



Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NPM. 196210221993031002

MOTTO

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَحَنَّا أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 247).



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan penulis haturkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas maka sripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku (ayahanda Koprawi Dan ibunda Jumairah) yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materil, naehat, dan do'a. Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit tapi saya berjanji tidak akan membuat semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah diberikan, saya akan tumbuh menjadi yang lebih baik lagi yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan yang istimewa saya untuk ayah dan ibuku.
2. Untuk adik-adik ku tercinta Anggi Novita Sari dan Muhammad Wildan Maulana terimakasih atas support kalian bertiga yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya kepada kakak mu ini yang akhirnya bisa menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Terimakasih buat keluarga besarku dari sebelah ayah maupun sebelah ibuku baik itu kakek nenek, paman dan bibiku serta sepupu-sepupuku yang tidak bisa aku sebut satu persatu yang selalu bertanya kapan lulus? Dan selau suport serta memberikan motovasi dalam hidupku ini saya persembahkan untuk kalian semua.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Agustin Mayasari lahir di Pekonmon Provinsi Lampung pada tanggal 10 Oktober 1997, anak pertama dari 3 saudara dari pasangan ayah yang bernama Koprawi dan ibu yang bernama Jumairah.

Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Pagar Agung Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim diselesaikan pada tahun 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Wali Songo Sukajadi Kabupaten Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Ma'arif 01 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayat, dan Krunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H) pada jurusan siyasah syar'iyah UIN Raden Intan Lampung shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhai oleh Allah SWT yaitu dengan agama islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan dan motivasi semua pihak memberi arti yang sangat tinggi bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairudin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden lampung.
3. Bapak Frengki, M. Si. Selaku ketua jurusan siyasah syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motifasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dharmayani, SHI., M.Sy selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motovasi sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah.

7. Kepada bapak Arwansyah selaku kepala Desa Pekonmon yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Pekonmon, serta pihak-pihak Nelayan yang terkait dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
 8. Karyawan dan karyawan/wati Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
 9. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam mengerjakan skripsi Erniyana, Hera Anita Herlina, Pebri Triyana, Mira Resti Ayu, terima kasih yang selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangati dan membantuku agar cepat selesai dalam mengerjakan skripsi ini.
 11. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Siyasah Syar'iyah C terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
 12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar lampung, 2 November 2020
Penulis

Hera Anita Herlina
NPM. 1621020139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xivi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Masalah	9
G. Signifikan Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	18
1. Pengertian Fiqh Siyasah	20
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	20
3. Pengertian Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah	23
4. Peran Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah	34
5. Kriteria Calon Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.....	38

6. Dasar Hukum Kepemimpinan.....	41
7. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan	45
B. Tinjauan Pustaka.....	47

BAB III PERAN KEPEMIMPINAN MERAJE DALAM SISTEM ADAT SEMENDE DESA PAGAR AGUNG KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN MUARA ENIM

A. Gambaran Umum Objek	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
2. Demografi Desa.....	51
3. Visi dan Misi Desa	54
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Peran Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende	55
2. Struktur Kepemimpinan <i>Meraje</i> Dalam Adat Tunggu Tubang.....	58
3. Kriteria Calon <i>Meraje</i>	61
4. Hak dan Kewajiban <i>Meraje</i>	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Kepemimpinan <i>Meraje</i> Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung.....	68
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan <i>Meraje</i> dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung.....	70

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama-nama kepala Desa Pagar Agung	51
2. Luas Wilayah Desa Pagar agung	52
3. Jumlah Penduduk Desa Pagar Agung	52
4. Mata Pencarian Penduduk	53
5. Tingkat Pendidikan Desa Pagar Agung	54



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur kepemimpinan <i>meraje</i> didalam <i>Tunggu Tubang</i>	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini. Judul merupakan salah satu bagian penting, dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagian pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya adapun judul skripsi yang dibahas adalah **“PERAN KEPEMIMPINAN MERAJE DALAM SISTEM ADAT SEMENDE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)”**. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut antara lain:

1. Peran menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.¹
2. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni untuk mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.²
3. *Meraje* (mama'an) adalah setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari keluarga sebelah jalur ibu, yang memiliki hak dan wewenang mengontrol,

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.

²Miftah Thoha *Kepemimpinan Dalam Manajemen*(Jakarta: P T Rajagrafindo Persada 2015) ,h.9.

mengendalikan, dan menghakimi peran yang dimainkan *tunggu tubang* itu sendiri. *Meraje* juga memiliki peran penting sebagai penerus keturunan dan juga penting sebagai penjaga adat supaya tetap lestari.

4. Sistem adat semende mempunyai ciri khas tersendiri dalam kepemimpinan.

Dalam adat semende berlaku sistem kekerabatan yang bersifat keibuan (*Matrilineal*), dimana pada masyarakatnya lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita, yang anak perempuan tertua dijadikan sebagai *Tunggu Tubang* (penunggu harta peninggalan orang tua yang tidak dapat terbagi-bagi).

5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.

6. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).³ Fiqh siyasah juga yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴

³Beni Ahmad Saebani, *fiqh siyasah pengantar ilmu fiqh islam* (Bandung: Pustaka Setia, (2007), h. 13.

⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*.(PT Gelora Aksara Pratama), h. 11

Dari penjelasan judul diatas, bahwa judul skripsi yang saya maksudkan adalah menyelidiki dan membahas secara mendalam tentang “PERAN KEPEMIMPINAN *MERAJE* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Study pada Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)” yaitu bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap cara memimpin di dalam sistem adat semende di mana adat tersebut menganut sistem Matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam suatu keluarga, kedudukan tertinggi berada pada anak laki-laki tertua di sebut *Meraje*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul tentang Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Study Pada Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim) adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Ingin mengetahui bagaimana peran kepemimpinan seorang *Meraje* dalam sistem adat semende dalam membimbing, mengawasi *tunggu tubang* dan menjadi tumpuan keluarga besar atas segala sesuatu yang terjadi baik hal buruk ataupun sebaliknya.
- b. Dalam Permasalahan yang diteliti sangat relevan untuk dibahas karena kurangnya pemahaman tentang apa arti *meraje* dalam adat semende dan dapat dianalisis sesuai dengan peraturan adat yang ada.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang penulis dalam usaha menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar S.H.
- b. Untuk menambah wawasan adanya *meraje* dalam adat semende bagi pembaca atau mahasiswa khususnya di UIN Raden Intan Lampung.
- c. Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, khususnya di Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Semende adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatra Selatan Kabupaten Muara Enim. pada suku semende terdapat suatu struktur organisasi atau lembaga adat yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya yaitu adat *Bemeraje Anak Belai* ini ada dua unsur yang sangat berkaitan dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya yaitu unsur *meraje* sebagai pengawas dan unsur *anak belai* termasuk *tunggu tubang* sebagai yang diawasi/dibimbing.⁵

Dalam Peran *meraje* ini memiliki aspek dinamis dari kedudukan atau status, yang mana seorang *meraje* disini tidak dipilih maupun memilih akan tetapi dipilih langsung melalui jalur otomatis yaitu baik kakak ataupun adik laki-laki tertua dari jalur ibu adalah *meraje*. Seseorang melakukan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peranan. Peran biasa juga

⁵Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinan Dalam Islam*. (Palembang: Pustaka Auliya, 2001), h.19

disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Dalam kepemimpinan *meraje* (mama'an) mempunyai peran yang sesuai dengan hukum adat semende yaitu memimpin musyawarah, menetapkan *Tunggu Tubang*, menjadi juru bicara (*besuare*), membimbing dan mengawasi para anak belai, memberi hukuman atau sanksi, mengawasi harta pusaka dan mencari jodoh. Dalam musyawarah keluarga, seperti apabila ingin mengadakan acara upacara pernikahan, *meraje* duduk paling tengah dan setiap pendapatnya menjadi pegangan utama dalam mengambil keputusan. Sebelum *Meraje* datang musyawarah belum dapat dimulai, kecuali atas izinnya. Apabila terjadi perselisihan dalam keluarga, maka hanya *meraje* yang berhak mengadili dan menyelesaikan perselisihan itu. *Meraje* dijadikan sebagai tumpuan keluarga besar atas segala sesuatu yang terjadi baik hal buruk atau pun yang sebaliknya.⁶

Kepemimpinan dalam wacana fiqh siyasah, kata *imamah* biasanya identik dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian tertinggi dalam negara Islam. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami aliran *imamah*. Kelompok syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikiran sunni menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang khalifah. Salah

⁶Sudiro Harsuno, Maskum, Yutina Sri Ekawandari, *Makna Simbol Tunggu Tubang pada Masyarakat Semende* Jurnal.fkip.Unila.(januari 2020), h 5.

satunya dari Abu al-Hasan al-Mawardi yaitu kepemimpinan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.⁷ Begitupun kepemimpinan dalam adat semende, *meraje* mempunyai hak dalam melindungi keluarga demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan adat.

Hal diatas merupakan suatu sikap sekaligus peran yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi rakyatnya. Menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana adalah sebuah amanah dan harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Tanggung jawab merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁸ Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban baik oleh orang yang mengangkatnya maupun di hadapan Allah SWT. Ketika seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya ialah seorang panutan rakyat dan bagian dari rakyat, maka ia akan merasa bahwa dirinya adalah pelayan yang bekerja untuk rakyat, berdiri di atas untuk semua golongan tanpa melihat suku, dan warna. Walaupun seorang pemimpin di angkat dari kalangan tertentu, namun dalam kepemimpinannya ia akan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana.⁹

Oleh sebab itu, baik *tunggu tubang* (anak perempuan tertua yang memegang warisan), *lebu jurai* (kakak atau adek laki-laki dari buyut tunggu

⁷Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press Anggota IKPI, 2017), h.9

⁸Muhamad Erwin, S.H.,M.HUM. *Filsafat Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.259

⁹Aham Sofyan, *Islam On Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), h. 2.

tubang), *jenang jurai* (kakek dari pihak ibu), *payung jurai* (mamak kepala waris), *apit jurai* (seluruh keluarga baik pihak laki-laki *meraje* (mama,an) atau dari pihak perempuan anak *belai*) harus patuh terhadap pimpinan *meraje*. Seperti di jelaskan dalam Q.S An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS An-Nisa ayat 59.*

Ayat diatas jelaslah sudah bahwasannya kita harus taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin tidak menyuruh berbuat kemaksiatan. Dalam perspektif fiqh siyasah menegakan kepemimpinan merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama terutama bagi kaum laki-laki, sebab manusia butuh saling membantu satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, peran *meraje* sangat penting demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan adat.

Kepemimpinan adat semende yang berlaku di desa Pagar Agung memang masih kental dengan adat akan tetapi dalam menjunjung tinggi peran *meraje* belum sesuai dengan tutuan adat, yang mana *meraje* baik itu kakak atau adik dari sebelah ibu sangat di junjung tinggi. *Tunggu tubang* di masyarakat adat semende tidak sekedar sebagai bentuk identitas yang perlu mereka pertahankan, akan tetapi di balik itu semua terselip kepentingan bagi laki-laki

(*meraje*) untuk tetap mempertahankan dan menguatkan kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang diposisikan sebagai *tunggu tubang* tidaklah memiliki kekuasaan sebagaimana yang terlihat. Dengan kata lain pemberian hak kepada perempuan dalam *tunggu tubang* tersebut hanya untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan saja. Pemberian peran kepada perempuan *tunggu tubang* berimplikasi pada kekuasaan yang disandang oleh kaum perempuan, akan tetapi justru terjadi penguat kekuasaan bagi kaum laki-lakinya (*meraje*).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahawa sistem kepemimpinan *meraje* dalam adat semende menganut dasar keturunan ibu (*matrilineal*), dimana pada masyarakatnya lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita, yang anak perempuan tertua dijadikan sebagai *Tunggu Tubang* (penunggu harta peninggalan orang tua yang tidak dapat terbagi-bagi). Sementara kepemimpinan yang ditinjau dari fiqh siyasah tidak memberikan batasan bahkan memberikan peluang yang sebesar-besarnya asalkan memenuhi syarat yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Pagar Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Muara Enim.

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian dalam skripsi ini menurut Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian

adalah untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.¹⁰ Dalam skripsi ini penelitian berfokus pada Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung dan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Adat Semende.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung?

F. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan tersendiri agar mendapatkan hasil yang baik dalam pencapaian yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam menunjukkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepemimpinan *Meraje* Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung.
2. Untuk menganalisis perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Kepemimpinan *Meraje* dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung.

G. Signifikasi Penelitian

¹⁰Lexy J Moleong, *metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2004), h. 44

Adapun signifikansi yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai peran dalam kepemimpinan *meraje*, yang berkaitan dengan sistem adat semende di desa Pagar Agung, dan dapat dipelajari dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*) dan UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis: dalam penelitian ini diharapkan agar mempunyai hasil yang positif bagi para pembaca dan membuka cakrawala pemikiran khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Peran Kepemimpinan *Meraje* dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung dan memberikan informasi dan masukan kepada peneliti lain serta menjadi sumbangan pemikiran dalam melakukan penelitian dalam bidang ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹¹ Metode yang diambil dalam meneliti yaitu suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan proses suatu penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah yang terbentuk menjadi satu ilmu pengetahuan, sehingga metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman atau tuntutan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya atau dihadapinya.

Sebagaimana metodologi yang dimaksud oleh Robert Bogdan dan Steven J. Taylor : “... *the process, principles, and procedures by which we*

¹¹Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 21.

*approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research.*¹²

Sehingga dalam pandangan penulis yang di maksud oleh oleh Robert Bogdan dan Steven J. Taylor yaitu metodologi merupakan suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,¹³ sehingga metode yang digunakan dalam suatu penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analisis, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari tempat penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responder,¹⁴ yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang dapat yang terdapat di ruang yang berkaitan dengan pustaka seperti buku, naskah, dokumen yang berkaitan dengan jurnal atau lainnya. Jadi penulis akan melakukan penelitian langsung terjun ke masyarakat dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 6.

¹³ *Ibid*, *Pengantar Penelitian Hukum* h. 7

¹⁴ *Ibid*, *Metode Penelitian*, h. 12

mengekspresikan diri dan melakukan objek penelitian tersebut dan mengumpulkan suatu data atau informasi dengan wawancara dan pendataan yang berkaitan dengan lapangan di Desa Pagar Agung Kec. Pulau Pangung Kab. Muara Enim.

b. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan disimpulkan.¹⁵ Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu, dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mempunyai kaitan langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari hasil wawancara (*interview*), buku-buku fiqh siyasah, Al-Qur'an dan As-sunnah yang ditulis oleh para ahli. Wawancara dengan sekelompok warga yang ada di Desa Pagar Agung dan wawancara langsung dengan warga yang berperan sebagai *Meraje*, agar dapat memberikan keterangan

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grapik Grafika Ke 3, 2011), h. 105.

¹⁶Saripuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 1998), h.7.

langsung tentang sejarah kepemimpinan *Meraje* dalam sistem adat semende.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung sumber data primer yang berupa buku, dokumen yang resmi, artikel, hasil penelitian, makalah, serta jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen penting lainnya. Sedangkan data sekunder menurut Abdurahman Fatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁷

c. Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder. Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan sumber dari kamus, internet, daftar bacaan, katalog perpustakaan, dan sebagainya yang berkenaan dengan judul penulis.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini prosedur yang digunakan yaitu metode pengumpulan data serta mengambil dari sejumlah responder yang berperan sebagai *Meraje* yang terdiri dari masyarakat desa Pagar Agung itu sendiri, Metode pengumpulan data menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi. Adapun rincian masing-masing sumber sebagai berikut:

¹⁷Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.38

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 54

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.¹⁹ Metode wawancara pada Desa Pagar Agung menggunakan wawancara tak terstruktur karena wawancara yang dilakukan secara terbuka dan berbentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian terutama sekali penelitian (kualitatif). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktifitas kehidupan. Secara umum observasi berarti pengamatan, mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban.²⁰

4. Metode Dokumentasi

¹⁹DR. Deddy Mulyana, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. (PT Remaja Rosdakarya), h. 180

²⁰Prof. DR. Imam Suprayoga. Drs. Tobrini, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (PT Remaja Rosdakarya), h.167

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pokok masalah berupa data-data dari Desa Pagar Agung yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat penulis ambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.²² Adapun populasi dalam suatu penelitian ini terdapat pada seluruh masyarakat Desa Pagar Agung Kec. Pulau Pangung Kab. Muara Enim yang berjumlah 858 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari

²¹ Suhar Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineck Cipta, 2006), h.

²² Husaini Usman *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.

sampel menuju populasi.²³ Dalam penelitian ini tehnik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang mana 10 orang tersebut memang benar-benar menjabat sebagai *Meraje* sehingga observasi yang dilakukan agar tepat pada tujuan.

6. Pengelolaan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan data dengan cara pengecekan atau pengoreksian data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Setelah itu melakukan teknik *Editing* yaitu digunakan untuk meneliti kembali data yang sudah terkumpul baik itu berupa kelengkapan jawaban atau kekeliruan yang akan diperbaiki serta untuk melihat kejelasan dan kesempurnaan penulisan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Rekontruksi Data (*reconstrucing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagian tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴ Setelah tahap Rekontruksi Data selesai maka tahap selanjutnya adalah interpretasi data. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memberi penjelasan data yang diperoleh sehingga mudah dalam memakainya. Sehingga dapat mencari gambaran yang sistematis, faktual

²³Bambang Sunggono, S.H.,M.S.*Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), h,121-123

²⁴Amiruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Balai Pustaka, 2006), h.107

dan aktual mengenai fakta-fakta yang terkait dengan Peran Kepemimpinan Meraje dalam Sistem Adat semende di Desa Pagar Agung.

7. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti.²⁵ Maka analisisnya bersifat *diskriptif kualitatif*, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberikan jawaban terhadap masalah yang berkaitan Peran Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah. Setelah semua data terkumpul penulis menyimpulkan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir *induktif*, yaitu dimulai dari kata yang bersifat khusus dan kongkrit yang bersifat umum.

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, Cetakan ke 15, 2010), h.133.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh siyasah* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁶ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah).²⁷

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencangkup sesuatu.²⁸ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h. 2

²⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 21

²⁸ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 3

Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, *fiqh* lebih populer lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinici.²⁹ Sementara asal siyasah tedapat tiga pendapat:

- a. Sebagaimana yang dianut al-Maqrizy menyatakan, berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga di baca siyasah.
- b. Sedangkan Ibnu Tahgri Birdi, siyasah berasal dari tiga campuran bahasa, yakni bahasa persia, turki dan mongol.
- c. Dan Ibnu Manzur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk masdar dari tafsiran kata *sasa*-*yasusu*-*siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih bintang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³⁰

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah

²⁹ Ibnu Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

³⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al’-Aarab* jilid 6 (Bierut: Dar al-Shadir, 1986), 108

tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan demi mereka. Dan definisi yang paling singkat menurut Ibnu Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³¹ Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, yaitu siyasah dzalimah yang diharamkan *syara'* dan siyasah adilah yang menegakkan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tercapainya tujuan syariat. *Syara'* berkewajiban untuk merujuk pada siyasah adilah dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.³² Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah*

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus : Dar al-Qalam, 2007), 45

³² Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama" . *Jurnal Al Adalah*, Vol. X. 3 Januari 2012, h. 270.

dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).³³

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. *siyasah qadha'iyyah* (peradilan),
- b. *siyasah harbiyah* (hukum perang)
- c. *siyasah idariyyah* (administrasi negara), dan
- d. *siyasah dauliyyah/siyasah khajiyyah* (hubungan internasional).³⁴

Sementara Abd al-Wahhab Khalifah di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁵

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadhaiyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara).

³³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp).

³⁴ Ibn Taimiyyah, *al-siyasah al-Syar'iyyah fi ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp)

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, h. 4.

- f. *Siyasah Duliyyah/siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik Perundang-Undangan (*siyasah dusturiyyah*).

Bagian ini meliputi bagian pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyr'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qhada'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik Luar Negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharajiyyah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang Muslim dengan warga negara non- Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al- duali al-amn*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional megatur antar lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat dua dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. Politik Keuangan dan Moneter (*siyasah maliyyah*)

Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁶

3. Pengertian Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah

Kepemimpinan menurut Haiman adalah suatu proses di mana seorang memimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran perasaan, atau tingkah laku orang lain.³⁷ Dalam pengertian kepemimpinan banyak yang mendefinisikan tentang konsep kepemimpinan ini. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain (pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain bertindak laku sebagaimana pemberani berperang.³⁸ Kepemimpinan dari segi Bahasa, berasal dari kata *leadership* (Kepemimpinan). Kajian kepemimpinan berdasarkan pada teori sifat. Teori ini hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin, bisa diartikan kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan.

Kepemimpinan menurut istilah yang umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar bekerjasama untuk

³⁶ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Kencana, Edisi Pertama, 2014), h. 16.

³⁷ Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005). h. 7-8

³⁸ Ngali Purwanto dkk, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 38.

mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.³⁹ Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penguasa dan anggota dalam rangka mencapai tujuan kelompok. Istilah kepemimpinan dalam hukum islam ada beberapa yang digunakan, yaitu *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *sultan*, *mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *khilafah*, *imamah*, *imarah*. Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini.⁴⁰

Dalam bahasa inggris pemimpin disebut *leader*, sedangkan kegiatannya disebut kepemimpinan atau akrab disebut dengan *leadership*. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan remis dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, agar terlaksana usaha yang mengarah pada pencapaian tertentu.⁴¹

Kata “*siyasah*” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Fiqh siyasah berasal dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Menurut istilah *fiqh* adalah “Ilmu atau pemahaman

³⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali Press. 1989), h. 39.

⁴⁰ Dr. H. Sutisna, M.A. *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. (Yogyakarta: 2014). h. 25

⁴¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2004), h. 39

tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (*tafsili*)". Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).

Ada beberapa ulama berpendapat mengenai masalah ketatanegaraan dalam Islam yang terdapat pada fiqh Siyasah. Diantaranya adalah Abdul Wahab Khalaf yang mendefinisikan siyasah sebagai peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴² Dan Ibnu Taimiyah juga turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁴³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh Siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *dadetable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 26

⁴³ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: menguak kelirunya Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta, Gozian Press, 2013), h. 50.

sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang berikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Istilah pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik, dan Sulthan*. Kata kepemimpinan sendiri dalam Fiqh siyasah yaitu imamah dan Khalifah yang antara lain bertugas sebagai pengganti kebinaan dalam melindungi negara dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kedzaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.⁴⁴

Dalam pandangan kepemimpinan terdapat tiga pandangan dalam memahami kata kepemimpinan. *Pertama*, posisi atau status tidak memusatkan perhatian yang ia miliki. Dalam pandangan Weber, sebuah prosedur hukum disebut otoritas hukum yang memusatkan perhatian hukum. *Kedua*, kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan memiliki tipe tentang kesucian lama. Dalam hal ini seorang pemimpin memiliki status yang ditentukan oleh adat-kebiasaan yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat didalam tradisi tertentu. *Ketiga*, kepemimpinan harus dari kemauan di dalam diri sendiri.⁴⁵

⁴⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Cet.2* (Jakarta: Qitshi Press, 2017), h. 9

⁴⁵ Surahman Amin, FM Siregar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Study Al-Qur'an*, Volume No. 1 (23 Oktober 2015), h.28

Dalam mempelajari ilmu Fiqh Siyasah ada beberapa metode sebagai acuan, antaranya ialah:

- a. Metode Ijtihad
- b. Pendekatan Qiyas
- c. Pendekatan Ijma'
- d. Pendekatan Istihsan
- e. Pendekatan Maslahah Mursalah
- f. Pendekatan Istishhab
- g. Pendekatan Urf (Hukum Adat).

Dalam hal ini dikatakan bahwa teori kepemimpinan Islam mengacu pada semua metode diatas, dalam mengambil suatu kebijakan maupun mengambil kebijakan dan menghadapi suatu permasalahan. Metode pendekatan di atas yang mengacu pada beberapa metode yang menjadi dasar ataupun landasan berfikir dan bertindak seorang pemimpin dalam Islam lebih kepada tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam fiqh siyasah dijelaskan bahwa terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan. *Pertama*, kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. *Kedua*, prinsip keadilan. *Ketiga*, prinsip persamaan (musawah). *Keempat*, prinsip musyawarah.⁴⁶

- a. Kedaulatan Tertinggi ditangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan umatnya juga wajib mengikuti

⁴⁶ Beni Ahamad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Al- rasyidin*, Cetakan Kedua (Bandung CV Pustaka Setia, 2015), h. 123-126.

peraturan perundang-undangan-Nya ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, dan ketaatan kepada Rasul-nya dan kemudian kepada Ulil Amri diantara orang-orang yang beriman, Selama Ulil Amri tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah.

Diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS: An-nisaa :59)

b. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi satu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah seharusnya mampu memperlakukan semua orang dengan adil, tidak berat sebelah dan juga tidak memihak. Dalam A-Qur'an menjelaskan prinsip keadilan dalam Firman Allah Q,S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q,S Al-Maidah : 8).

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat, cita-cita sosial yang bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun norma hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan-harapan dan ketentraman hidup tanpa batasan waktu.

c. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Hujarat (49) : ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara itu dan takutkanlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat, (Q.S. Al-Hujarat (49) : 10).

Seperti hadist Rasulullah menjelaskan :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya: “Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁷

Hadis di atas secara jelas menyatakan bahwa larangan bagi setiap muslim untuk mendzalimi dan menjerumuskan saudaranya kepada keburukan. Hal itu karena orang-orang Islam adalah saudara seagama dan seiman. Oleh karena itu, agama mendorong umat Islam agar saling mencintai satu sama lain sebagai ia mencintai kepada dirinya sendiri. Begitupula, membenci apa yang dibenci saudaranya. Potret persaudaraan sesama muslim tersebut pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat nabi. Dua sahabat itu adalah kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Kedua sahabat nabi ini saling mengasihi dan saling membantu.

d. Prinsip Musyawarah

Musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim kebenaran sendiri. Dengan musyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada tujuan yang baik, hanya strategi yang dibutuhkan untuk mencapai ke yang lebih baik, sehingga musyawarah bukan melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, melainkan

⁴⁷ Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Jihad wa al-Sir* Bab 130-132 dengan nomor hadist 2442. Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghiroh Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, h.516.

mecari solusi yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan yang ada, supaya mencapai tujuan yang telah disamakan.

Firman Allah telah menjelaskan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan bermusyawarah dengan orang-orang yang berpengetahuan tinggi atau orang yang berpandangan lebih baik. Dalam Q.S Asy Syura (42) ayat :38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan bagi orang yang menerima (mamtuhi)seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q. S Asy-Syura (42) : ayat 38.

Dalam Fiqh Siyasah terdapat empat unsur yang harus di penuhi dalam Kepemimpinan Islam selain pada berpegangan teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu kedaulatan yang tinggi ada ditangan Allah SWT, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan. Bagi setiap pemimpin dalam memimpin suatu masyarakat atau umat ialah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ialah pemimpin agama dan juga pemimpin suatu negara dengan sifat amanah, fatonah, tabligh, sidiq yang diteruskan oleh *Khulafaur Ar-rasyidin* sebagai generasi kepemimpinan umat Islam selanjutnya (khalifah). Ia dinamakan khalifah (pengganti wakil) karena ia bertugas mengganti atau mewakili peran Rasulullah SAW dalam memimpin umat manusia. Ia dapat dipanggil dengan sebutan Khilafah Rasulullah atau

biasanya dapat disebut dengan panggilan khilafah.⁴⁸ Berikut sifat-sifat yang dimiliki nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan sebagai pemimpin negara:

a. *Shidiq* (benar, jujur atau adil)

Sifat *shidiq* mencakup pengertian yang luas. Jujur menjadi salah satu kepribadian seorang muslim lahir dan batin, baik dari segi ucapan maupun perbuatannya. Setiap perkataan maupun tindakan seorang Nabi dan Rasul jujur dan benar-benar datang dari Allah.

b. *Amanah* (dapat dipercaya atau tidak berkhianat)

Amanah berasal dari kata *amuna* yang artinya dapat dipercaya. Amanah juga dapat berarti aman dan titipan. Sejak kecil Rasulullah sudah memiliki sifat amanah bahkan beliau dijuluki dengan *al-Amin* yang artinya dapat dipercaya. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-a'raf ayat 68:

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

Artinya: “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu” (QS. Al-A'raf ayat 68).

c. *Tabligh* (mengajak atau menyampaikan)

Kata *tabligh* dapat dirunut dari akar kata *ballagha-yubalighu-tablighan*, yang artinya menyampaikan ajaran-ajaran (Islam) yang diterima dari Allah untuk mengajak (dakwah kepada) orang supaya

⁴⁸ Imam Al-Mawardi, *Op Cit.*, h. 36

mempedomani dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 67.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ



Artinya: *Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*

d. *Fathanah* (pandai, cerdas dan bijak)

Fathanah adalah sifat dimiliki Rasulullah Saw yang mendalami agama dan berwawasan luas, dan sikap yang bermoralitas. Sifat-sifat tersebut tampak dalam diri Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Rasulullah Saw juga cerdas dalam menerima tugas dan amanah yang diberikan kepadanya.⁴⁹

Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah SWT. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT, kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah SWT untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk,

⁴⁹ Abdul Qodir, *Kaderisasi Kepemimpinan Agama Melalui Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi. No. 3 (2000). H. 147-151.

nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman - firman Allah.

4. Peran Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah

Diantara kesempurnaan agama, Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam mengatur seluruh aspek di kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan dengan Allah (*Habluminallah*) maupun yang berhubungan dengan sesama manusia (*Habluminannas*). Kepemimpinan merupakan suatu amanah salah satunya kepemimpinan di pemerintahan, dalam meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, adil, dan baik. Tugas yang diamanatkan juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana, Karena menunjuk seorang pemimpin bukan berdasarkan dari golongan dan kekerabatan semata, tetapi lebih mengutamakan keahlian dan keaktifan. Kepemimpinan mempunyai arti kekuasaan.

Kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan Allah SWT, mengingatkan bahwa kekuasaan hakikatnya hanya milik Allah SWT. Allah lah yang memberi kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah juga yang akan mencabut kekuasaan dari siapapun jika dikehendaki-Nya.

Dalam kehidupan pentingnya seorang pemimpin yang efektif ada beberapa poin, salah satunya ialah seorang pemimpin harus ada dalam kehidupan yang teratur dan rapi, sesuatu keadilan harus ditegakan dan berwenang terhadap yang lemah dan menyesuaikan diri dengan perubahan

yang ada di sekitarnya serta memanfaatkan perubahan demi kepentingan organisasi dalam mengembangkan, melatih dan menjaga anggotanya.⁵⁰

Dalam Islam hampir semua Ulama menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah (Titipan) yang setiap saat harus dipertanggung jawabkan dan diambil wewenangnya, amanah itu diperoleh dari Allah SWT lewat pemilihan yang dilakukan oleh Manusia, kecuali para Nabi dan Rosul yang langsung dipilih oleh Allah. Oleh karena itu dalam melaksanakan amanah, Manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggung jawab. Jika Manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temannya sendiri, atau memaksakan diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata.

Seorang mu'min ketika ia memegang kekuasaan perlu kesadaran yang sangat besar terhadap kepribadiannya. Ia harus bersikap rendah hati, tidak ada sikap keangkuhan dalam dirinya sedikitpun, dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh menyelewengkan kekuasaannya dalam bentuk apapun. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8-11 :

⁵⁰ Pres As-Suwaiddan Thariq, *Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil, Melahirkan Pemimpin Masa Depan* (Jakarta Gema Insane 2005)., h, 53-56.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.*

Pemimpin atau penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan di segala bidang. Ia akan mempertanggung jawabkan semua kebijakan yang diambil sewaktu di dunia yang menyangkut persoalan umat. Apabila dia adil, jujur, dan benar maka Allah akan senantiasa merahmatinya, tetapi jika dia dzalim dan menyelewengkan kekuasaannya, maka Allah akan melaknatnya, dan jika pemimpin itu sudah sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahkan.

Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah:

- a. Menjaga agama agar berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya dan menindaknya sesuai dengan

hak-hak dan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah.

- b. Menjalankan hukum kepada dua pihak yang bertikai, dan memutuskan permusuhan antara pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
- c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
- d. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang dan binasa.
- e. Menjaga daerah-daerah dengan bentang yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna untuk merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
- f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam.
- g. Menarik fai dan memungut zakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam secara jelas dalam nash dan ijtiyah.
- h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mall (kas Negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- i. Mengangkat pejabat-pejabat terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya menjalankan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah

wewenangannya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna.⁵¹

5. Kriteria Calon Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dalam menetapkan seorang pemimpin tidak ada ketentuan yang khusus. Dalam hal ini mengakibatkan banyak terjadinya perdebatan yang hebat serta perdebatan antar politik berdarah dalam sejarah Islam. Kepemimpinan dalam Islam tidak memiliki petunjuk yang khusus dan lengkap tentang *khilafah*. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kepemimpinan merupakan persoalan budaya manusia yang akan berkembang terus menerus dari waktu ke waktu dan dari budaya satu ke budaya yang lain. Maka dari itu Al-Qur'an tidak mencantumkan masalah khusus tentang kepemimpinan (*khilaf*).

Menurut Imam Al-Mawardi Kriteria menjadi seorang pemimpin memiliki kelebihan apapun atas orang lain. Ada tujuh poin untuk menjadi acuan penting bagi seorang pemimpin yang akan mencolonkan dirinya menjadi seorang pemimpin yaitu:

- a. Adil yang memiliki syarat yang menyeluruh. Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- c. Memiliki panca indera yang sehat dan lengkap, baik mata, telinga maupun mulut sehingga dapat menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat agar tidak terhalangi untuk bergerak cepat.

⁵¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,....h.37-38.

- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai macam kepentingan.
- f. Mempunyai sifat keberanian dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara.
- g. Mempunyai nasab dari suku Quraisy berdasarkan nas dan ijma'.⁵²

Dalam hal ini al-Mawardi merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad :

الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

“ Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy”⁵³

Sementara menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat menjadi pemimpin ada 10 (sepuluh), yaitu:

- a. Dewasa atau *aqil baligh*

Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan emosional dan sudah dewasa. Dengan kecerdasannya seorang pemimpin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

- b. Otak yang sehat

Memiliki akal yang sehat dan tidak cacat mental.

- c. Merdeka

Yang dimaksud dengan merdeka yaitu seorang pemimpin harus merdeka dari segala hal, yang mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat.

- d. Laki-Laki

⁵² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,...,h.11

⁵³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h.39.

Seperti halnya yang di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa

Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْضَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka meaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lah Maha Besar.

e. Keturunan Quraisy

Disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW, “ Sesungguhnya pemimpin-pemimpin (umatku) itu (harus) dari suku Quraisy.”

f. Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat

Calon pemimpin harus mempunyai kelengkapan sesuai fungsi panca indera. Jika calon pemimpin memiliki gangguan panca indera, maka hal itu akan menghalangi untuk menjabat sebagai pemimpin.

g. Kekuasaan yang nyata

h. Hidayah

Memiliki daya fikir dan daya rancang yang kuat.

i. Memiliki ilmu pengetahuan

Para ulama berpendapat bahwa “jabatan negara tidak dapat di sandang oleh seseorang yang ilmunya belum sedemikian tinggi” sehingga mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang syari’at.

j. Memiliki sifat *wara’* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

6. Dasar Hukum Kepemimpinan

Setelah wafatnya Rasulullah sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah pemimpin. Allah telah memberitahukan kepada umat manusia, tentang pentingnya suatu peran pemimpin dalam islam. Nabi Muhammad SAW selain Rasulullah, juga sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Persoalan pertama yang muncul setelah Nabi wafat yaitu mengenai suksesi. Setiap umat muslim perlu memahami dan menghayati mengenai persoalan pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an tentang kepemimpinan salah satunya yaitu:

a. Q.S An-Nisa (4) Ayat :58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa (4) 58).*⁵⁴

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, CV. Duta Ilmu Surabaya, 2008 h.

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya. Ayat ini ditunjukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatih al-Ghaib, amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi tiga bagian:

Pertama, yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini Allah memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-Nya.

Kedua, amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kepada kriteria keadilan dalam penguasa kepada rakyatnya dengan cara tak memberatkan kepada mereka.

Ketiga, amanah terhadap manusia diri sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serta tak mendahulukan hawa nafsu dan menjauhkan dari segala yang merugikan.⁵⁵

Ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh syu'bah dalam tafsirnya dari Hajjaj dari Ibn Juraij, dia berkata ayat ini turun pada Ustman bin Thalhah ketika peristiwa *Fath Makkah*, Setelah Rasulullah Saw mengambil kunci Ka'bah darinya, beliau masuk ke ka'bah bersamanya. Setelah keluar dari ka'bah dan membaca ayat di atas, beliau memanggil Usman dan memberikan kunci ka'bah dan membaca ayat di

⁵⁵ Moh. Afif sholeh, 2019 <https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat/>. Diakses pada 16 juni 2020

atas, beliau memanggil Usman dan memberikan kunci dari ka'bah kepadanya. Ketika Rasulullah SAW keluar dari ka'bah dan membaca firman di atas, Umar bin Khatab berkata “*surely I have never heard him read that verse before*”. Dari kata-kata ‘Umar ini tampak bahwa ayat ini turun di dalam ka'bah.⁵⁶ Ayat ini merangkum dua kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu anjuran untuk menunaikan amanah dan berlaku adil dalam segala urusan. Dalam ayat ini ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankan bahwa dalam memerintahkan dan menetapkan hukum kepada pemiliknya harus menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan. Dengan begitu baik amanah maupun keadilan harus di tunaikan dengan baik tanpa memandang suku, budaya dan keturunan.

Salah satu bukti agama Islam merupakan ajaran yang *kamil* adalah Allah banyak menyebutkan tentang keharusan ada pemimpin baik secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang kehidupan kemasyarakatan yang menjadi petunjuk (*guidance*) bagi pemimpin dalam membawa kehidupan umat membawa masalah serta bahagia dunia akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah:

⁵⁶ Jalaludin al-Suyuthi, *Terj. Sebab Turunan Ayat Al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani 2008), h. 173

b. (Q.S An-nisa ayat 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat ini menunjukkan bahwa keta'atan kepada *ulil amri* (pemimpin) harus dalam rangka (kerangka) ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata "*al-amr*" dalam ayat ini (yang diantara artinya: urusan, persoalan, masalah, perintah), menunjukkan bahwa pemimpin itu tugas utama dan kesibukan sehari-harinya antara lain mengurus persoalan-persoalan rakyatnya. Pemimpin merupakan cerminan masyarakat yang dipimpinnya serta ia selalu dekat dan bersama dengan rakyatnya dalam suka maupun duka. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk taat kepada pemimpin serta beliau mengancam bagi siapa saja yang tidak taat dan patuh kepada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepadaku, niscaya ia durhaka terhadapku. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, niscaya ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa durhaka kepada pemimpin, niscaya ia durhaka kepadaku"* (HR, Bukhari).

7. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan

Mengenai hukum keberadaan pemimpin dalam Islam dapat dilihat dari penyampaian beberapa ulama dan pemikirannya, diantaranya:

a. Imam Al-Ghazali

Penulis kitab *Ihya'Ulumuddin* ini bernama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi Asy-Syafi'i. Mengemukakan dalam hal penentuan syarat untuk menjadi seorang pemimpin negara, mengajukan sepuluh syarat yang harus dipenuhi: haruslah seorang laki-laki, sehat pendengaran dan penglihatan, merdeka, sehat, punya kekuasaan nyata, memiliki kemampuan, *wara'*, berilmu dan haruslah bersuku Quraisy.

b. Imam Ibnu Khaldun

Mengatakan bahwa seorang pemimpin negara haruslah memenuhi lima syarat: *peratama*, berilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan menurutnya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah dan sanggup membuat keputusan jalan ijtihad. *Kedua*, *al-Kifayah*, yakni melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Ketiga*, berlaku adil. Hal ini diperlukan karena imamah adalah suatu kelembagaan keagamaan yang mengawasi lembaga lainnya yang pelaksanaannya membutuhkan keadilan. *Keempat*, sehat panca indera, dan Kelima, keturunan Quraisy.

c. Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang pantas menjadi pemimpin adalah seorang yang mempunyai kualifikasi kekuatan dan

Integritas. Hal ini didasarkan atas petunjuk Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Maksud dari ayat tersebut mengatakan bahwa orang yang terbaik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (*amanah*). Dalam hal syarat menjadi seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan harus dari suku Quraiys. Hal ini menurutnya bahwa pernyataan itu adalah masalah yang diperselisihkan oleh kalangan ulama, maka syarat itu tidak mungkin ditetapkan. Bahkan menurutnya, pendapat harus dari suku Quraiys adalah pendapat yang bertentangan dengan konsep persamaan yang digagas oleh Al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jadi meskipun pendapat itu bertentangan dengan hadist, akad tetapi tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an sendiri.

d. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Imam Abu Zahrah terciptanya kekhalifahan yang bersifat kenabian dan tidak berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Jumhur ulama menurutnya bersepakat menetapkan empat syarat bagi seseorang yang akan diangkat menjadi imam yaitu :

- 1) Seorang pemimpin haruslah berasal dari suku Quraysh.
- 2) Adanya *bay'ah* dari *al ahl al-Hall wa - Aqd'* (wakil rakyat).
- 3) Musyawarah, proses pemilihan khalifah haruslah dengan jalan musyawarah.
- 4) Keadilan, syarat keadilan juga harus ditepati pada pribadi seorang imam, tidak memprioritaskan keluarganya, tidak mengangkat seseorang karena hawa nafsu, tidak mengutamakan orang yang disenangi, dan tidak menyingkirkan orang yang dibenci.⁵⁷

B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu menemukan penelitian dari Ainal Yakin yang berjudul “Kepemimpinan Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Uludanau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini

⁵⁷ Arsyad Sobby Kusuma, *Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Negara Islam*, *Islamica*, Voll. 4, No 1(20 Juni 2020), h. 125-127

adalah untuk mengetahui Kepemimpinan adat Semende di masyarakat adat di Desa Uludanau dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap kepemimpinan adat semende di Desa Uludanau. Penelitian yang di ambil dari skripsi ini yaitu penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode menganalisis data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan adat Semende yang berlaku di Desa Uludanau yaitu terdapat dua kepemimpinan yakni ketua adat yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat dengan asas demokrasi di mana masyarakat boleh mencalonkan sebagai ketua adat dengan syarat pertama beraga Islam, Kedua, mengerti tentang adat istiadat, dan ketiga tidak pernah melanggar adat. Yang kedua yaitu kepemimpinan adat *Tunggu Tubang* merupakan kepemimpinan di dalam suatu lembaga keluarga dengan pimpinan tertinggi disebut *Meraje*. *Meraje* disini tidak dipilih melainkan secara otomatis setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari jalur ibu disebut *Meraje*. Dalam Fiqh Siyasah terdapat persamaan dan perbedaan terhadap kepemimpinan adat semende yang berlaku di desa Uludanau yang mana dalam Fiqh Siyasah seorang calon pemimpin bisa langsung mencalonkan diri sedangkan dalam adat *Tunggu Tubang* seorang pemimpinnya berdasarkan garis keturunan. Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti ada sedikit perbedaan. Peneliti lebih fokus membahas tentang peran *Meraje* dalam sistem adat semende di mana kepemimpinan adat semende di desa pagar Agung masih menjunjung tinggi seorang *Meraje*. Sedangkan dalam skripsi Ainal Yaqin yang berjudul Kepemimpinan Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Study Desa Uludanau Selatan) lebih berfokus terhadap kepemimpinan adat Semende yang mana terdapat dua mekanisme pengangkatan pimpinan adatnya yang dipilih melalui asas demokrasi di mana setiap masyarakat boleh mencalonkan sebagai

ketua adat. Sementara peneliti lebih berfokus terhadap peran yang dimainkan oleh *Meraje* yang mana seorang *Meraje* sistem pengangkatannya melalui jalur otomatis yaitu jalur dari keturunan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; Rineka Cipta, 2011.

Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, t.tp.

Ahmad Sofyan, *Islam On Leadership*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.

Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad wa al-Sir* Bab 130-132 nomor 2442. Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghiroh Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Cet.2, Jakarta: Qitshi Press, 2017.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Balai Pustaka, 2006.

Bambang Sunggono, S.H.,M.S., *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Fiqh Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Duta Ilmu Surabaya, 2008.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

DR. Deddy Mulyana, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Dr. H. Sutisna, M.A. *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: 2014.

Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semendo dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinanan Dalam Islam*, Palembang: Pustaka Auliya, 2001.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Ibnu Manzhur, *Lisan al'-Aarab*, jilid 6, Beirut: Dar al-Shadir, 1986.

Ibnu Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibn Taimiyyah, *al-siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.

Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Qisthi Press Anggota IKPI, 2017.

Jalaludin al-Suyuthi, *Terj. Sebab Turunan Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali Press. 1989.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2004.

M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, PT Gelora Aksara Pratama, 2008.

Ngelim Purwanto dkk, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1994.

Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2005.

Pres As-Suwaidan Thariq, Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Gema Insane 2005.

Prof. DR. Imam Suprayoga. Drs. Tobrini, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kelirunya Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta, Gozian Press, 2013.

Saripuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke 15, Bandung: Alfabeta cv, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grapik Grafika, 2011.

Jurnal

Abdul Qodir, Kaderisasi Kepemimpinan Agama Melalui Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*. No. 3, 2000.

Arsyad Sobby Kusuma, Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Negara Islam, *Islamica*, Voll. 4, No 1, 20 Juni 2020.

Sudiro Harsuno, Maskum, Yutina Sri Ekawandari, Makna Simbol Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo, *Jurnal FKIP Unila*, Januari 2020.

Surahman Amin, FM Siregar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Study Al-Qur'an*, Volume No. 1, 23 Oktober 2015.

Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama" . *Jurnal Al Adalah*, Vol. X. 3 Januari 2012, h. 270.

Wawancara

Ahmad Dailani (Tokoh Adat), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 25 Agustus 2020.

Aidi Arwahidin (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 27 Agustus 2020.

Habni Hadi (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 26 Agustus 2020.

Hermansyah (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 26 Agustus 2020.

Hermawan (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 26 Agustus 2020.

Jasmin (Sekertaris Desa), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung, 25 Agustus 2020.

M. Rizal (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 26 Agustus 2020.

M. Saili (Kepala Desa), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung, 25 Agustus 2020.

Sultan Saudani (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 26 Agustus 2020.

Syekh Bawaihi (Meraje), Wawancara Dengan Penulis, Desa Pagar Agung 26 Agustus 2020.

Sumber On-Line

Moh. Afif sholeh, 2019 <https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat/>. (Diakses pada 16 juni 2020)